



# Kartini dan Kesetaraan Gender di Indonesia

Perjuangan R.A. Kartini telah membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk dapat memiliki akses dan kesempatan yang setara dengan kaum pria terhadap berbagai hal di luar urusan domestik.

Setelah peringatan Kartini berlalu semenjak ditetapkan pada 21 April 1964, apakah kesetaraan gender di Indonesia telah terwujud? Dalam tulisan ini, secara khusus saya ingin menyoroti tentang kesetaraan gender dalam dunia bisnis di negara kita dan peran penting praktis komunikasi dalam pencapaian kesetaraan gender.

Menurut data Bank Dunia dalam laporan tahunan berjudul *Women, Business, and the Law 2023*, kesetaraan gender di bidang ekonomi belum sepenuhnya dijamin oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Tahun ini, negara kita mendapat skor kumulatif 70,6 dari total 100. Angka tersebut sebetulnya meningkat dari tahun 2022, yakni 64,4. Namun, kita masih berada di urutan ke-8 dari total 11 negara ASEAN. Oleh karena itu, kita tidak bisa berpuas diri.

Bank Dunia meyakini bahwa perempuan tidak dapat berpartisipasi penuh dalam ekonomi ketika sistem hukum di negaranya membatasi mereka, tidak dapat melindungi dari kekerasan, serta masih mendiskriminasi mereka di tempat kerja. Masih menurut Bank Dunia, ekonomi negara akan menjadi lebih kuat dan dinamis ketika semua warga negaranya dapat berkontribusi dengan setara. Misalnya, saat B20 Summit di Bali lalu, Mari Elka Pangestu selaku Direktur Pelaksana Pengembangan Kebijakan dan Kerja Sama Bank Dunia mengatakan, secara finansial kesetaraan gender mampu menambah sekitar 11 triliun dolar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global.

Meski kesetaraan gender sebetulnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun hal ini tidak otomatis membuat pelaksanaannya menjadi mudah. Banyak negara yang masih berjuang untuk mengurangi ketimpangan gender. Bahkan dalam pidato peringatan hari Perempuan Internasional 2023, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengatakan, kesetaraan gender baru akan dicapai 300 tahun lagi.

Menurutnya, di banyak negara hak-hak perempuan disalahgunakan, diancam, dan dilanggar. Ketimpangan ini berlangsung di seluruh dunia, maupun secara khusus di Indonesia, yang menurut laporan terakhir *Global Gender Gap World Economic Forum* masih menduduki peringkat ke-92 dari 146 negara. Kondisi ini mendesak kita untuk sama-sama melakukan upaya agar dapat mencapai target tujuan pembangunan

berkelanjutan (*sustainable development goal/SDG*) kelima, yaitu kesetaraan gender.

## Kesetaraan Gender dan “Public Affairs”

Melihat perkembangan dunia bisnis beberapa tahun terakhir, tampak jelas bahwa fungsi *public affairs* dan komunikasi menjadi sangat strategis di dalam korporasi. Dinamika sosial dan politik membuat jajaran manajemen puncak korporasi membutuhkan dukungan kuat dalam menavigasi perubahan-perubahan yang terjadi. Posisi *public affairs* dan komunikasi korporat dapat menjadi advokat bagi kesetaraan gender di sisi internal maupun eksternal perusahaan, karena mereka memiliki akses yang dekat dengan pembuat keputusan dalam organisasi.

Di era ketika perusahaan semakin dituntut oleh para pemangku kepentingan untuk menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ketika *rating environmental, social, governance* (ESG) menjadi pertimbangan utama bagi para *investor*, maka *public affairs* dan komunikasi dituntut ikut memastikan kesetaraan gender menjadi salah satu agenda utama organisasi. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik keberlanjutan, kita perlu meyakinkan pemangku kepentingan internal dan memastikan agar perusahaan memiliki kebijakan dan sistem yang dapat menjamin implementasi kesetaraan gender.

Hal ini akan memungkinkan karyawan perempuan dapat mencapai potensi optimalnya sehingga nantinya dapat

mendorong pertumbuhan organisasi. Banyak studi membuktikan bahwa ketika perusahaan memberi kesempatan setara kepada karyawan berdasarkan kinerja tanpa mendiskriminasi gender tertentu, maka produktivitas perusahaan juga ikut naik dan secara tidak langsung hal ini juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Di sisi lain, dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender untuk eksternal perusahaan, misalnya untuk asosiasi bisnis, komunitas di sekitar area operasi perusahaan, maupun kelompok lain yang relevan dengan organisasi, maka kita juga ikut sukseskan agenda besar pencapaian salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan. Upaya serius untuk menjadi mitra pemerintah juga tentu akan berdampak positif bagi operasi dan reputasi perusahaan kita.

## Panduan Praktis

Women Empowerment Principles (WEPs) adalah tujuh prinsip yang digagas oleh United Nations Global Compact dan United Nations Women. Di dalamnya berisi panduan bagi dunia bisnis tentang cara untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di tempat kerja, dunia bisnis, dan masyarakat. Setiap prinsip dilengkapi dengan langkah-langkah praktis yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan, mulai dari tataran strategis seperti komitmen manajemen puncak dan kebijakan, sampai kepada hal taktis seperti promosi, upah, kesehatan dan kenyamanan bekerja, bahkan juga urusan rantai pasok, pengawasan dan pelaporan.

Sejak awal, kami dari Kiroyan Partners telah berkomitmen untuk menjalankan praktik bisnis yang beretika. Dengan demikian praktik antidiskriminasi selalu

diterapkan dalam segala aspek operasi perusahaan. Untuk mempertegas dukungan perusahaan bagi kesetaraan gender di Indonesia, perusahaan kami juga menandatangani Komitmen WEPs. WEPs sangat bermanfaat bagi organisasi, besar maupun kecil, untuk bisa memulai langkah yang nyata dan kemudian dapat meningkatkan komitmen dan memperbaiki implementasinya secara bertahap.

Semoga peringatan Kartini tahun ini kembali menyemangati kita semua, secara khusus para praktisi *public affairs* dan komunikasi, untuk ikut secara aktif berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesetaraan gender, untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik. Sebagai langkah awal, kita dapat berpartisipasi dalam ikut menandatangani Komitmen WEPs ini. ●

Meski kesetaraan gender sebetulnya berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, namun hal ini tidak otomatis membuat pelaksanaannya menjadi mudah. Banyak negara yang masih berjuang untuk mengurangi ketimpangan gender.



R.A. Kartini  
21 April



Verlyana (Veve) Hitipeuw  
CEO & Principal Consultant Kiroyan  
Partners dan Advocate G20  
Empower Indonesia.